

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN MADIUN

**Sudarmiani
FPIPS IKIP PGRI Madiun**

Abstract

This research serves a consideration for the Municipality Office of Religion Department and the managerial staff of schools under this area in effort of developing the teachers' professionalism. Even when the competency-based curriculum does not suggest the central role of teachers, they still have important roles in developing and producing science. They are in charge of managing the process of the science development, which in turn needs professionalism. The development of teachers' professionalism is inevitably important focus of the stakeholders.

The research is conducted at Madrasah Tsanawiah around Madiun Regency under: 1) observation, and 2) interview techniques. The analysis is carried out by quantitative and qualitative approaches.

The analysis results in conclusions as follows: 1) the development of teachers' professionalism has become the rational conduct at the Madrasah by underpinning strategies, such as: sending teachers to higher scholarships and training programs. The regulation of national education system requires the teachers' professionalism, like the regulation No 2, 1989, No 20, 2003, and the regulation for teachers and lecturers. 2) Although they realize that the higher scholarship is not risk-free, teachers are eager to join them for the professionalism development and their better life to live.

Keywords : teachers' professionalism, development

Pendahuluan

Peranan pengelola madrasah sangat penting dalam mengembangkan profesionalisme guru dalam kerangka pelaksanaan KTSP. Peranan ini ditunjukkan oleh penerapan MBS (*Manajemen Berbasis Sekolah*) dalam pelaksanaan KTSP. Melalui kerangka MBS, pengelola dapat mengembangkan perencanaan yang matang dengan melibatkan seluruh masyarakat sekolah, baik orang tua, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah, maupun *stakeholder* lainnya, termasuk di dalamnya pengguna lulusan sekolah (madrasah) tersebut. Hal ini telah menjadi tujuan semua tingkat pendidikan dasar, yaitu penyelenggaraan manajemen pendidikan berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school/community based management*). Dengan keadaan yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakuntabel dan mendorong partisipasi masyarakat, pengelola madrasah mampu mengembangkan proses belajar mengajar yang PAIKEM dan berkualitas. Pengembangan ini diawali oleh peningkatan profesionalisme guru. Guru yang profesional mampu menciptakan proses belajar-mengajar dengan berbagai modelnya.

Dalam kerangka pelaksanaan KTSP, profesionalisme guru dituntut mampu membangun pengalaman belajar bagi siswanya. Profesionalisme guru tidak saja diukur dari kesesuaian mata pelajaran dengan bidang studinya, tetapi lebih dari itu kemampuan mengembangkan materi ajar. Guru tidak sekadar mereproduksi dari ilmu yang diperolehnya pada waktu pendidikan kesarjanaannya, lebih dari itu harus mampu mentransformasikan ke dalam materi ajar sesuai dengan situasi dan sumber-sumber belajar yang pada sekolah tersebut. Pada waktu di perguruan tinggi, seluruh fasilitas belajar sangat lengkap dan setidaknya memadai dengan jumlah mahasiswanya, namun hal ini menjadi berbeda tatkala harus mengajar di sekolah/madrasah.

Sebagai catatan, semakin ke pinggiran kota dan pada wilayah pedesaan, jumlah dan kualitas koleksi perpustakaan sangat rendah, sering hanya berupa majalah, buku atau apapun yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Kualitas perpustakaan juga berkurang pada jenjang yang lebih rendah. Sementara itu, kondisi yang serupa pada fasilitas laboratorium, hanya sekitar 50 madrasah swasta di Jawa Timur yang memiliki laboratorium, bergantung pada kemampuan yayasan. Bila guru tersebut profesional (dan berkualitas), kondisi yang demikian ini bisa diatasi dengan

mengembangkan model pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajarnya.

Dengan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar, siswa memperoleh pengalaman belajar. Secara ekstrim, dalam rancangan kurikulum berbasis kompetensi awal pengalaman belajar tersebut juga harus mampu memberikan keterampilan hidup bagi siswanya (*life skill education*), meskipun pada akhirnya tuntutan ini kemudian lebih dimanifestasikan hampir serupa dengan model “muatan lokal” yang terintegrasi pada mata pelajaran tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di madrasah tsanawiyah negeri dan swasta di Kabupaten Madiun. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah kepala sekolah dari madrasah negeri dan swasta, guru dan komite sekolah (majelis wali madrasah). Untuk madrasah tsanawiyah swasta, penelitian juga memperhatikan apakah dari madrasah yang didirikan oleh yayasan lokal atau oleh yayasan regional dan nasional yang telah membangun sistem kelembagaan tertentu, seperti Muhammadiyah dan YPM (Yayasan Pendidikan Ma’arif). Selain kepala sekolah atau wakasek, subjek penelitian berikutnya adalah guru-guru bidang studi dan staf administrasi sekolah.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Observasi ini dipermudah dengan membuat rekaman film (dengan *handycam*) yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Di dalam proses tersebut akan diamati bagaimana guru-guru bidang studi mengembangkan strategi proses belajar mengajar sebagai *performance* dari profesionalisme. Langkah berikutnya adalah dengan wawancara untuk memahami konstruk-konstruk yang dibangun oleh pihak pengelola, komite sekolah (majelis wali madrasah) dan guru tentang profesionalisme guru dan strategi pengembangannya. Lebih dari itu, melalui pemahaman pengelola dan majelis wali madrasah dapat diketahui bagaimana rancangan pendanaan untuk pengembangan strategi pengembangan profesionalisme guru.

Analisis data dalam penelitian ini menggabungkan antara pendekatan *kualitatif dan kuantitatif*. Pada pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan model etnografi dari Michael H. Agar. Di dalam proses analisisnya, data dikumpulkan menjadi tiga tahap analisis. Pertama melakukan pengkodean dan melakukan identifikasi kondisi objektif madrasah dan masyarakat sekitarnya, serta lingkungan geografisnya. Demikian pula data dari hasil wawancara, dibuat *fieldnote*, kemudian dikoding dan kemudian dihubungkan antara koding dan diperoleh penjelasan hubungan tersebut. Sementara itu, hasil tersebut dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

Sementara itu, melalui pendekatan kuantitatif penelitian ini menggunakan statistik diskriptif, yaitu tabel frekuensi dan silang. Penggunaan teknik analisis ini akan mengetahui pola umum yang dilakukan oleh madrasah dan guru dalam pengembangan profesionalismenya.

Hasil Penelitian

Setelah data terkumpul, peneliti menemukan bagaimana peningkatan profesionalisme guru MTs di Kabupaten Madiun Tahun 2007 sebagai berikut.

1. Strategi Madrasah dan Alokasi Dana dalam RAPBM

Scott dan Baker (2003: 128) misalnya lebih menunjukkan profesionalisme guru lebih kompleks. Guru diharapkan tidak saja mengetahui berbagai model pengajaran, tetapi lebih dari itu harus mampu menerapkan dengan menggunakan berbagai model transformasi pengetahuan yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Mereka, para guru, harus terbuka terhadap saran-saran dari siswa, dan tidak semata-mata hanya mementingkan hasil. Tugas harus difokuskan pada kemampuan siswa dalam mengakses sumber-belajar.

Sementara itu, kesesuaian ini harus dibuktikan dari jadwal per semester yang tidak selalu sama dan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Mata pelajaran sosiologi misalnya sering diajar oleh guru sejarah dan hal itu selalu dinilai tepat karena dengan alih-alih ketika masa studi pernah memperoleh 2 (dua) SKS.

Demikian pula, mata pelajaran Fisika, Kimia dan Biologi sering diajar oleh guru yang sama dari salah satu bidang studi tersebut. Mata pelajaran Bahasa Inggris sering juga digantikan oleh guru Bahasa Arab. Tidak jarang guru Bahasa Arab ini juga merangkap sebagai guru mata pelajaran Akidah, Fikih dan Aswaja.

Gambaran tentang bagaimana strategi madrasah dalam meng-alokasikan Anggaran Pengembangan Profesionalisme Guru MTs di Kabupaten Madiun Tahun 2006/2007 adalah sebagai berikut.

Besaran (dalam rupiah)	MT s Swasta		MT s Negeri		Jumlah	
	freq	%	freq	%	freq	%
Tidak Disebutkan	13	54,16	6	50,00	19	52,77
Kurang dari 1 juta	6	25,00	3	25,00	9	25,00
1 s/d 2 juta	3	12,50	1	8,33	4	11,11
2 s/d 3 juta	1	4,17	2	16,67	3	8,33
3 s/d 4 juta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Di atas 4 juta	1	4,17	0	0,00	1	2,78
Jumlah	24	100	12	100	36	100

Tabel 1 : Rekapitulasi Anggaran Pengembangan Profesionalisme Guru MTsN dan MTsS Di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2006/2007

Pola/strategi yang digunakan untuk pengembangan profesionalisme guru adalah mengikutsertakan guru ke dalam program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar sekolah, *stakeholder*, seperti Diknas dan Depag. Strategi ini semakin kuat digunakan pada madrasah aliyah yang berstatus swasta. Hal ini bisa dipahami bahwa menyelenggarakan pelatihan dan workshop sendiri akan memerlukan biaya yang lebih besar, sedangkan bila menjadi peserta kegiatan, yayasan cukup memberikan uang transport kepada guru-guru tersebut. Namun tidak demikian pada yayasan penyelenggara madrasah yang “kuat”, mereka lebih suka untuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop sendiri. Salah satu alasan, pelatihan tersebut dapat menyertakan seluruh guru di madrasah tersebut, bahkan madrasah lain di bawah pembinaannya. Secara terinci pola/strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Bentuk Kegiatan	MT s Swasta		MTs Negeri		Jumlah	
	freq	%	freq	%	freq	%
Tidak Disebutkan	12	50,00	0	0,00	12	33,33
Menyelenggarakan Seminar dan Workshop sendiri	4	16,67	7	58,33	11	30,56
Menyertakan dalam Seminar dan Workshop	7	29,17	4	33,33	11	30,56
Studi Lanjut	1	4,17	1	8,33	2	5,56
Lain-lain	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	24	100	12	100	36	100

Tabel 2 : Bentuk Kegiatan sebagai Pilihan Strategi dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru MTsN dan MTsS di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2006/2007

Strategi lain untuk membiayai studi lanjut, sejumlah madrasah mengalokasikan dalam BOM-ABT. Anggaran operasional madrasah dari pemerintah ini diberikan

setiap satu semester sekali. Anggaran bantuan studi lanjut diberikan setelah seluruh biaya operasional dari madrasah bisa dipenuhi, seperti adminstrasi dan ATK. Anggaran tersebut juga biasanya terbatas tidak untuk membiayai SPP dalam jumlah besar. Sementara itu, pada madrasah di bawah naungan pondok pesantren, pengelolalnya lebih mengharapkan bantuan dari pondok pesantrennya. Tidak seluruh siswa menjadi santri di pondok tersebut, tetapi hanya sebagian saja, sisanya mengikuti sistem diniyah.

Dari hasil penelitian, strategi pengembangan profesionalisme oleh guru madrasah aliyah di Kabupaten Madiun Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Indikator	MTs Swasta, khususnya guru non-PNS	MTs Negeri	
		Mandiri	Beasiswa
Tujuan	Prasyarat Mengajar untuk jenjang MTs; Untuk mengajar ke jenjang lebih tinggi	Peningkatan kemampuan akademik Peningkatan karier (pangkat)	Peningkatan kemampuan akademik Peningkatan karier (pangkat)
Inisiatif	Sendiri	Sendiri	Kanwil dan Depag
Cara	Mencari informasi, mendaftar dan mengikuti seleksi	Mencari informasi, mendaftar dan mengikuti seleksi	Ikut seleksi proyek DMAP
Pilihan PT	Dalam satu kota/ kabupaten	Satu kabupaten atau yang mudah ditempuh	Tergantung dari MOU proyek DMAP dan Pt
Jenjang	Sarjana & Magister	Magister	Magister
Bidang Studi	Diusahakan sesuai dengan latar belakang mata pelajaran Tergantung perguruan tinggi	Sesuai dengan bidang studi pendidikan sarjana dan minat	Sudah ditetapkan oleh proyek DMAP, diusahakan sebagai kelanjutan pendidikan sarjana
Pembiayaan	Sendiri dan Bantuan Keluarga	Sendiri, pinjaman ke Bank, koperasi, hingga mencari beasiswa di Kanwil	Selama beasiswa belum turun, meminjam dana talangan lewat sekolah dan Koperasi.
Risiko	Tidak ada	Kehilangan jabatan dalam struktur organisasi Madrasah	Kehilangan jabatan dalam struktur organisasi Madrasah

Tabel 3 : Strategi Pengembangan Profesionalisme oleh Guru Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Madiun Tahun 2006/2007

Dukungan internal dari MTs dalam mengikuti studi lanjut dapat dilihat dalam tabel tersebut di bawah ini sebagai berikut.

Indikator	Pengelola MTs Swasta	MTs Negeri
Kondisi Obyektif	Jumlah guru terbatas;	Jumlah guru memadai, ada "rumput" bidang studi
	Kualitas guru bervariasi, dari jenjang SLTA hingga sarjana;	Kualitas guru standard, yaitu berjenjang sarjana
	Kemampuan finansial terbatas dan tergantung dari dana masyarakat (jumlah siswa)	Kemampuan finansial bersumber dari pemerintah dan dana masyarakat (<i>biaya</i> siswa)
Informasi tentang studi lanjut	Kurang	Memperoleh kriman dari Perguruan Tinggi dan Kanwil Depag
Pertimbangan	Memberi kemudahan, dan diusahakan tidak mengganggu proses belajar-mengajar	Memberi kemudahan dan diusahakan sesuai dengan latar belakang pendidikan guru pemohon; Tidak mengganggu proses belajar mengajar; Memperhatikan masa kerja.
Preferensi Lokasi	se-Kabupaten	Tidak ada preferensi lokasi PT
Preferensi Status	Tidak ada preferensi	Diusahakan PTN
Kebijakan untuk Jam Mengajar	Ditambah agar memperoleh tambahan pendapatan	Dikurangi agar tidak mengganggu studi
Kebijakan Pendanaan	Tergantung dari Kebijakan Yayasan	Dalam skala kecil dapat diusahakan dari RAPBM, selain dari pemerintah (beasiswa)
		Memberikan rekomendasi untuk akses pinjaman ke Bank
Koperasi	Tidak ada	Sangat membantu pada situasi Krisis selama masa studi

Tabel 4 : Pola Dukungan Internal Madrasah Tsanawiyah dalam Studi Lanjut Guru di Kabupaten Madiun Tahun 2006/2007

1. Guru Profesional = Guru Kreatif

Dari data lapangan, guru-guru yang mengembangkan profesionalismenya, baik melalui pelatihan maupun studi lanjut (S2) telah menunjukkan perilaku mengajar yang berbeda, bahkan beberapa di antaranya telah berani melakukan eksperimen atau tepatnya penelitian tindakan kelas (PTK/CAR¹) dalam skala kecil.

Selain itu, dari pelatihan dan studi lanjut ini, mereka memperoleh materi ajar, bahkan mengembangkan sumber-sumber belajar baru, seperti jaringan internet. Secara ekstrim pada waktu rencana penerapan KTSP, guru-guru tersebut memperoleh bahan lebih dahulu tentang kompetensi dasar dan standard kompetensi pada bidang studinya, begitu pula dengan bentuk silabus, rencana pembelajaran dan sistem evaluasi. Mereka juga mengenal dan telah menerapkan lebih dahulu tentang pembelajaran kognitif dan kooperatif. Ketika menerapkan pembelajaran ini, tidak saja dirasakan oleh murid-muridnya sebagai “proses belajar yang menyenangkan,” tetapi juga diperhatikan oleh guru-guru lainnya.

Kreativitas dalam proses belajar mengajar ini sangat diperlukan apalagi pada awal sistem kurikulum baru karena pedomannya biasanya bersifat garis besar (“global”), guru kemudian terjebak pada pola-pola yang seperti biasanya dilakukan. Ketika ada contoh dari pelaksanaan kurikulum baru, guru sudah tidak lagi mau atau kehilangan semangat untuk melakukan perubahan. Bagi siswa, selain tidak melihat perbedaan pelaksanaan kurikulum baru, proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman. Hal itu berbeda bila guru secara kreatif melakukan perubahan. Perubahan itu memberikan suasana yang berbeda.

Dari subbab sebelumnya, struktur pada sejumlah madrasah, khususnya negeri, memberikan peluang (*enabling*) bagi guru-guru yang profesional. Guru-guru diberi peluang menerapkan dan mengembangkan proses belajar- mengajarnya. Tidak saja mengapresiasi kreatifitas itu, tetapi lebih jauh guru-guru tersebut diberi posisi dalam struktur madrasah, menjadi waka ataupun kepala madrasah. Dari posisi ini, guru-guru tersebut memiliki peluang dan mengembangkan suasana yang inovatif dan kreatif. Hal itu sebenarnya berlaku juga pada madrasah tsanawiyah swasta, meski yayasan dan pondok pesantren tetap memberikan pengaruh. Oleh karena itu, loyalitas dan dedikasi tidak saja kepada perkembangan madrasah, tetapi juga kepada yayasan dan/atau pondok pesantren. Persoalan lain di madrasah tsanawiyah swasta adalah pendanaan.

Selain itu, ada *stakeholder* turut menunjang pengembangan profesionalitasnya. Untuk pelatihan, Depag telah memberikan ruang bagi guru untuk menjadi tutor dan menyelenggarakan pelatihan. Sementara itu, dalam hal meneliti dan menulis, MDC Jawa Timur (*Madrasah Development Centre*) Kanwil Jawa Timur memberikan ruang bagi guru yang mau meneliti dan menulis.

Selain itu, MDC juga memfasilitasi pembuatan buku ajar. Dalam prosesnya, MDC memanggil guru-guru master ke Surabaya dan mendiskusikan rencana pembuatan buku. Guru-guru master dalam satu bidang studi kemudian saling berinteraksi, bertemu dan membagi tugas untuk menulis. Lokasi pertemuan berpindah-pindah bergantung pada kesepakatan tim tersebut. Pada waktu yang ditentukan, draft buku tersebut dikirim ke Surabaya dalam bentuk *hardcore* dan CD. Dari data CD ini kemudian *disetting* oleh tim dari MDC dan dikirim ke penerbit. Di dalam dua tahun kegiatan, seorang guru bersama timnya bisa membuat hampir 6 (enam) judul, atau setiap buku untuk setiap semester. Memang, tidak semua buku didanai untuk diterbitkan, bergantung pada kebijakan Depag Pusat. Buku ajar yang telah diterbitkan ini telah disebarkan ke seluruh Jawa Timur.

Pembahasan

Ada sejumlah pemahaman tentang profesionalisme guru, mulai dari guru yang harus mampu menyajikan pengetahuan yang terbaru, hingga guru yang harus bisa menyampaikan materi ajar dengan secara menyenangkan dan dipahami peserta didik. Secara ekstrim, peserta didik menilai bahwa guru yang profesional adalah guru yang

memberikan penilaian yang objektif pada kualitas peserta didik, meski di balik itu ada “kesan” atau “harapan” guru itu harus murah dalam memberikan nilai.

Di dalam pengelolaan internal, dari lingkungan madrasah tsanawiyah anggaran pengembangan profesionalisme guru dimasukkan ke dalam RAPBM (Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah) Meski sebagian besar (52,77%) tidak bersedia menyebutkan besaran anggaran peningkatan profesionalisme guru, namun diketahui anggaran yang terbesar bisa mencapai di atas 4 juta. Salah satu alasan mengapa mereka tidak bisa menyebutkan secara rinci besaran anggaran peningkatan profesionalisme adalah ketergantungan terhadap program pelatihan yang diselenggarakan di luar madrasah, seperti: pelatihan dari Kanwil Depag dan Diknas. Ketergantungan menjadi semakin tinggi pada madrasah yang memiliki jumlah siswa yang sedikit. Selain itu, jumlah tersebut juga tidak bisa dipastikan secara rinci karena tergantung dari jumlah siswa. Ada beberapa madrasah menentukan anggaran 2.000 s/d 3.000 per siswa, atau 30% dari jumlah RAPBM. Ada pula yang menargetkan 10% s/d 30% dari anggaran RAPBM. Alokasinya digunakan dalam bentuk pelatihan dan rapat dinas yang diisi atau mengundang pakar tentang topik tertentu.

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan profesionalisme adalah (1) Mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan ini merupakan cara yang relatif paling murah dalam peningkatan profesionalitas guru. Kegiatan ini bisa diselenggarakan oleh madrasah sendiri atau Kanwil Depag. Keinginan untuk mengikutsertakan guru sebanyak mungkin hanya ada pada madrasah yang “besar”. Cara lain adalah menyelenggarakan pelatihan internal. Pelatihan tersebut biasanya dilakukan pada waktu rapat dinas dan libur antar tahun ajaran. Pihak MTs swasta bersama dengan organisasi afilialnya mengundang narasumber dari internal organisasi afilial tersebut atau dari perguruan tinggi. Hal itu terjadi pada waktu persiapan pelaksanaan KTSP tahun 2006. Bagi guru, hal yang demikian sangat dibutuhkan untuk penyegaran; (2) Strategi yang kedua adalah melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pilihan melanjutkan studi bagi seorang guru itu sebenarnya merupakan keputusan yang beresiko, terutama bagi mereka yang telah berkeluarga karena pendapatan mereka, baik utama maupun tambahan bergantung dari jam mengajarnya, terutama pada Guru MTsS. Hal yang serupa sebenarnya juga dialami oleh guru PNS. Strategi kedua adalah mengajar di SMP swasta lainnya. Kegiatan ini dilakukan setelah kewajiban mengajar di MTs tetapnya. Biasanya, hal ini dilakukan tidak karena semata-mata pendapatan tersebut, tetapi keterikatan emosional terhadap lembaga (yayasan) atau pondok pesantren tersebut.

Tawaran studi lanjut untuk guru PNS diberikan oleh Kanwil Depag, sementara itu guru non-PNS memperoleh dari yayasan pengelola madrasah. Hal terakhir ini bergantung dari kekuatan ekonomi dari yayasan tersebut. Ada dua pola tawaran studi lanjut dari Kanwil Depag. Hal ini berbeda dengan guru-guru MTs yang non-PNS. Di lingkungan MTsS, biasanya terdapat dua jenis guru, yaitu: guru PNS yang diperbantukan dan guru yayasan (non-PNS). Guru PNS ini mengajar di madrasah tersebut, tetapi memperoleh gaji dari pemerintah sesuai jenjang pangkat dan golongannya. Secara resmi, kehadirannya di MTsS tersebut atas permintaan dari yayasan yang mengalami kekurangan tenaga guru yang berkualitas, bahkan beberapa di antaranya menjabat sebagai pengelola madrasah, baik sebagai kepala sekolah atau organ lainnya. Bagi yayasan, guru ini sangat menguntungkan karena mengurangi biaya operasional. Yayasan tidak perlu membayar gajinya, kecuali terdapat kelebihan jam mengajar yang telah ditentukan. Lebih dari itu, jaringan yang dimiliki oleh guru tersebut sangat membantu dalam proses belajar mengajar di madrasah tersebut. Guru yang demikian ini memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi sama seperti yang ditawarkan pada guru-guru MTsN, sedangkan guru yayasan tidak memperoleh tawaran itu.

Oleh karena tidak memperoleh tawaran seperti guru PNS, apabila ingin melanjutkan studi, guru-guru tersebut mencari sendiri program studi dan jurusan yang diinginkan. Lebih dari itu, mereka membiayai biaya kuliahnya. Oleh karena itu, kecenderungan untuk melanjutkan studi di dalam kota yang menggunakan sistem

perkuliahan Sabtu-Minggu. Hal ini terkadang menimbulkan kecemburuan antara guru yayasan dan guru DPK (PNS).

Melihat keadaan yang demikian, kepala madrasah biasanya tidak saja memberikan dorongan moral bagi guru yang melanjutkan studi lanjut. Tidak itu saja, melalui dana RAPBM, kepala sekolah “mengalihkan” atau “mengkhususkan” dana pengembangan profesionalisme guru ke program bantuan studi lanjut, bahkan ada pula yang memberikan dana “talangan” untuk biaya hidup dan transport selama beasiswa tersebut belum turun.

Dari uraian di atas, guru yang telah melakukan studi lanjut akan memiliki pengetahuan yang lebih tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru yang telah menempuh jenjang studi lanjut akan memperoleh rujukan perkembangan ilmu pengetahuan melalui internet maupun buku-buku terbitan terbaru. Mereka pada umumnya akan menjadi rujukan untuk PBM dan Materi Ajar. Pengembangan profesionalisme juga dilakukan melalui kegiatan penelitian tindakan kelas, maupun dengan menulis, dan sudah ada beberapa tulisan dari beberapa guru yang diterbitkan oleh MDC Kanwil Depag Jawa Timur.

Kesimpulan

Dalam usaha peningkatan profesionalisme guru, madrasah dengan kondisi objektif mengembangkan sejumlah strategi, mulai mengikut-sertakan ke dalam program pendidikan studi lanjut hingga pelatihan. Hal ini disadari karena peningkatan itu merupakan tuntutan yang tidak ditawar-tawar lagi dari “pasar” (masyarakat pengguna) dan pemerintah. Tuntutan masyarakat pengguna dan pemerintah ini diformulasikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mulai dari UU No. 2 tahun 1989 hingga terakhir UU No. 20 tahun 2003, dan kini UU Guru dan Dosen. Sebelum mengajar, guru dituntut apakah telah memenuhi kriteria sebagai pendidik dalam jenjangnya. Pilihan untuk pendidikan studi lanjut harus dipenuhi tatkala guru tersebut tidak memenuhi kriterianya, meskipun memerlukan biaya yang besar.

Pemberian pelatihan pada guru dan kepala madrasah akan me-ningkatkan profesionalitas di masing-masing fungsinya, baik sebagai pendidik atau pengelola madrasah. Di dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh pengetahuan baru (*perkembangan kontemporer*) tentang materi ajar, teknologi pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah, sekaligus simulasi penerapannya. Hal itu bergantung pada tema atau bidang kajian dalam pelatihan tersebut. Penyelenggaraannya tidak memerlukan biaya yang besar, tetapi dapat diikuti oleh guru dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan tidak selalu tergantung dari inisiatif pemerintah, tetapi sejumlah madrasah justru menyelenggarakan pelatihan sendiri dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi atau pakar pendidikan dari organisasi afiliasinya, seperti NU dengan Lembaga Pendidikan Maarif dan Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun demikian, pilihan cara pengembangannya merupakan pilihan rasionalitas dari guru tersebut. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi objektif guru, apakah sebagai guru PNS ataukah guru non-PNS. Guru PNS memiliki peluang lebih untuk tawaran beasiswa studi lanjut yang memang diprioritaskan padanya. Sementara itu, guru non-PNS yang sebagian besar berada di M Tsanawiyah Swasta memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh beasiswa. Meskipun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, beasiswa ini sangat diharapkan bagi guru yang ingin melanjutkan studi karena konsekuensi dari studi lanjut adalah kehilangan pos-pos sumber keuangan tambahan.

Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan pun berbeda. Guru PNS lebih mengharapkan dan mencari beasiswa dalam studi lanjut. Kalaupun tidak

memperolehnya, mereka akan melanjutkan studi dengan biaya sendiri karena ada harapan peningkatan karier, yaitu kenaikan pangkat dan golongan. Peningkatan karier ini berimplikasi pada penerimaan pendapatan. Hal itu juga dilakukan oleh guru non-PNS yang mengajar di MTs Swasta, apalagi bila jenjang pendidikan belum memenuhi syarat sebagai guru. Namun, bila hanya ingin memperoleh pengetahuan akademik dan pengajaran, mereka lebih cenderung mengikuti pelatihan yang tidak berimplikasi pada “gangguan” ekonomi keluarga, bahkan sebaliknya mendapat uang saku.

Saran

Mengikuti studi lanjut sering menimbulkan krisis di dalam keluarga. Krisis ini timbul karena beasiswa tidak bisa menggantikan pendapatan tambahan di luar gaji (bagi program beasiswa), apalagi yang dengan biaya sendiri. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk studi lanjut harus mencari dana talangan atau koperasi bila yayasan memiliki sumber keuangan yang cukup kuat. Guru non-PNS dan guru PNS (biaya sendiri) mencari alternatif pembiayaan dari lingkungan eksternal Madrasah, seperti mengambil kredit Bank, atau “memanfaatkan” kerabat luas, hingga pindah rumah dan tinggal bersama mertua, atau menjual aset keluarga dengan harapan akan “diganti” (dalam tanda kutip) dengan kelimpahan rezeki setelah menamatkan pendidikan lanjut). Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sangat diharapkan alokasi anggaran pendidikan untuk bantuan studi lanjut ditingkatkan baik dari jumlah penerima maupun besarnya nominal beasiswa tersebut. Demikian juga untuk bantuan biaya penelitian dan penulisan buku ajar, agar kreativitas meneliti dan menulis buku ajar semakin meningkat di kalangan para guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharsimi, Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dedi Permana. 1999. *Kepemimpinan Mandiri (Profesional) Kepala Sekolah*. Bandung: PT Arana Panca Karya.
- Danim, S. 2002. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Depdiknas. 2003. *UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depdiknas.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Rosda.
- Nawawi, Hadari, Martini. 2004. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Owen, Robert G. 1981. *Organizational Behaviour in Education*, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Engewood Cliffs.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Rosda.
- Nawawi, Hadari, Martini. 2004. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nawawi, Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Owen, Robert G. 1981. *Organizational Behaviour in Education*, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Engewood Cliffs.

Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.